



**PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN SILPA
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Fildzah Asry Sajidah¹, Henny Yulsiati², Yevi Dwitayanti³
fildzahasry22@gmail.com¹, henny.yulsiati@yahoo.com², yevi_dwitayanti@yahoo.com³
Politeknik Negeri Sriwijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021 dengan 85 unit pengamatan. Penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews versi 12.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA berpengaruh positif secara simultan terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Alokasi Belanja Modal.

Abstract

This study aims to find out the effect of original local revenue, balancing fund, and financing budgeting of capital expenditure in regencies/cities in South Sumatera. The population in this study is a report on budget realization in 85 regencies/cities in South Sumatera for the 2017-2021 fiscal year with 85 unit observation. This study used application Eviews version 12. The result show that original local revenue, balancing fund, and surplus of financing budgeting simultaneously have a positive effect and significant to capital expenditure. Partially, local revenue and surplus of financing budgeting has no effect on capital expenditure. The balancing fund has a positive and significant effect on capital expenditure

Keywords: Regional Original Income, Balancing Fund, Excess Budget Financing, Capital Expenditure Allocation.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi serta memiliki tugas untuk, termasuk memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sendiri. Otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah dituntut dengan menjalankan pemerintahan yang efisien dan efektif, meningkatkan pemerataan, mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan adanya otonomi daerah, banyak hal yang ingin dicapai. Dengan otonomi daerah, pembiayaan dalam pengeluaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki hak untuk menggali setiap potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan. Kemampuan keuangan setiap daerah tidak semuanya sama, hal inilah yang akan menyebabkan adanya kesenjangan fiskal. Untuk melihat adanya kesenjangan fiskal ini, dapat dilihat dari pelaksanaan desentralisasi pemerintah pusat dalam mentransfer dana perimbangan kepada masing-masing daerah untuk digunakan dalam mendanai kegiatan operasional. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat, diharapkan untuk pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana tersebut dalam anggaran belanja modal yang digunakan untuk menambah aset tetap dalam meningkatkan pelayanan publik yang tertuang dalam APBD.

Alokasi belanja modal didasarkan belanja akan lebih baik jika dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, seperti kegiatan pembangunan, kemudian dalam penerimaan pemerintah sebaiknya digunakan untuk program-program pelayanan publik, pendapat ini dapat menyiratkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto and Yustikasari 2007). Alokasi belanja modal didasarkan dengan kebutuhan daerah khususnya untuk masyarakat akan sarana dan prasana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Kaunang, et al 2016). Berdasarkan LKPD Tahun 2017-2021 pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan terdapat permasalahan yang ada yakni dalam pengalokasian anggaran belanja modal beberapa mengalami penurunan dan berfluktuatif setiap tahunnya. Belanja Modal yang menurun tentu disayangkan karena belanja modal merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect yang menggerakkan perekonomian seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan infrastruktur, serta ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai (Adi. 2022. Databoks.com, 16 Agustus 2022). Pengalokasian anggaran belanja modal tergantung pada penerimaan pendapatan asli daerah, bantuan dana transfer dari pemerintah pusat, serta bagaimana efisiensi pengeluaran pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. (Kemenkeu, 2011).

Penelitian terdahulu mengenai yang dilakukan oleh (Lestari, 2017) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siagian 2020) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Jikwa dkk, 2017) menyimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Risqiyah & Yunani 2022) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawan & Andris 2019) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Aditiya & Dirgantari 2017) menyimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Perbedaan dengan peneliti terdahulu yakni penulis menambahkan variabel independen yakni SiLPA, dan tempat penelitian yang berbeda dimana penulis melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta tahun periode yang digunakan berbeda yakni tahun anggaran 2017-2021.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2017-2021. Sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kriteria pengambilan sampel:

Tabel 1 : Kriteria Pengambilan Sampel

No	Identifikasi	Jumlah Pemerintah Daerah
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017-2021	17
2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memiliki LKPD secara lengkap dan telah diaudit oleh BPK tahun 2017-2021	0
3	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai sampel	17
4	Jumlah tahun penelitian	5
	Jumlah unit pengamatan	85

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Selatan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tahapan uji yang dilakukan yakni pemilihan model data panel, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, dan uji R². Berikut adalah model regresi yang digunakan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Alokasi Belanja Modal

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi untuk X₁, X₂, X₃

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Perimbangan

X₃ = SiLPA

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 2 :Hasil Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	26.63170	25.51409	27.74737	24.67880
Median	26.54887	25.41429	27.73506	24.92656
Maximum	27.74069	27.77847	28.76350	27.23887
Minimum	25.25130	24.04999	27.06201	20.53982
Std. Dev.	0.502499	0.804329	0.411779	1487265

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 2 hasil statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel belanja modal memiliki nilai minimum 25.25130, maximum sebesar 27.74069, mean 26.63170 dan standar deviasinya sebesar 0,502499. Variabel PAD memiliki nilai minimum 24.0499, maximum 27.77847, mean 25.51409 dan standar deviasinya 0,804329. Variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum 27.06201, maximum 28.76350, mean 27.74737 dan standar deviasinya 0,411779. Variabel SiLPA memiliki nilai minimum 20.53982, maximum 27.23887, mean 24.67880 dan standar deviasinya 1487265.

Uji Chow dan Hausman Test

Tabel 3 : Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.309048	(16,65)	0.0003
Cross-section Chi-square	50.645475	16	0.0000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan Tabel 3 nilai probabilitas Cross-Section Chi-Square 0.0003 < nilai $\alpha = 0.05$ maka H0 ditolak, sehingga model terbaik adalah Model Fixed Effect.

Tabel 4 :Hasil Hausman Test

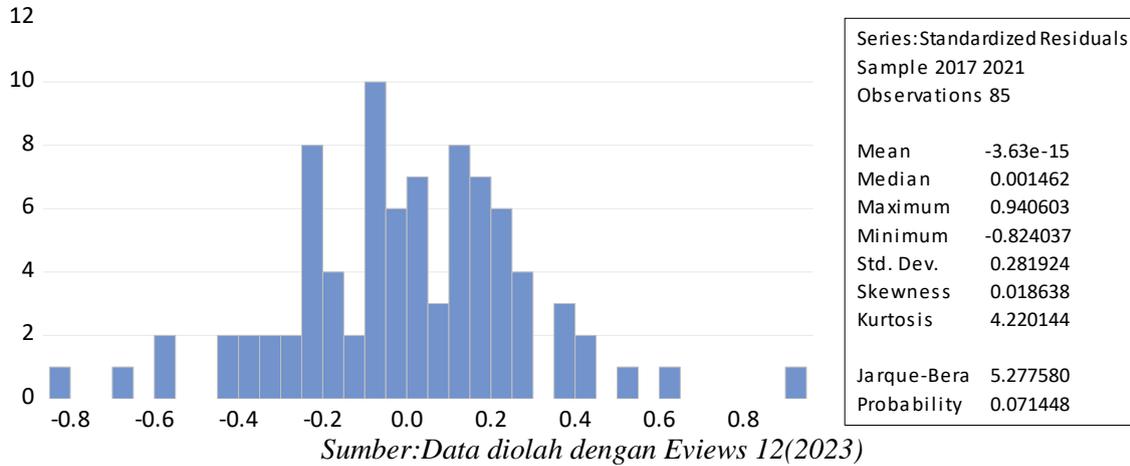
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.064891	3	0.1085

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai probabilitas 0.1085 > nilai $\alpha = 0.05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga model terbaik adalah Model Random Effect.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5 : Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan tabel 5 hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 5.277580 dan nilai probability (p-value) sebesar 0.071448. Nilai probability (p-value) lebih dari α (0.071448 > 0.05), maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 : Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.781011	0.355198
X2	0.781011	1.000000	0.511997
X3	0.355198	0.511997	1.000000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi setiap variabel independen dibawah dari angka 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel independen tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.514892	Prob. F(3,81)	0.6732
Obs*R-squared	1.590623	Prob. Chi-Square(3)	0.6615
Scaled explained SS	1.673255	Prob. Chi-Square(3)	0.6429

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 1.590623 dan nilai Probability Chi-Square (3) sebesar 0.6615. Nilai p-value (probability Chi-square) lebih dari α (0.6615 > 0.05, maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 : Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.583634
--------------------	-----------------

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.583634 yang berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Durbin-Watson yaitu $-2 < DW < +2$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah terbebas dari autokorelasi karena nilainya adalah $-2 < 1.583634 < +2$.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 9 : Hasil Regresi Linier Berganda Random Effect Mode

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.295919	3.452678	-0.375337	0.7084
X1	0.073347	0.079832	0.918770	0.3609
X2	0.953121	0.168640	5.651804	0.0000
X3	-0.015817	0.024088	-0.656626	0.5133

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil regresi linier berganda dengan Random Effect Model diperoleh nilai Coefficient variabel X1 sebesar 0.073347, nilai Coefficient variabel X2 sebesar 0.953121, nilai Coefficient X3 sebesar -0.015817 dan nilai Constanta sebesar -1.295919. Maka diperoleh hasil persamaan:

$$Y = -1.295919 + 0.073347 X_1 + 0.953121 X_2 - 0.015817 X_3$$

Uji t

Tabel 10 : Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.295919	3.452678	-0.375337	0.7084
X1	0.073347	0.079832	0.918770	0.3609
X2	0.953121	0.168640	5.651804	0.0000
X3	-0.015817	0.024088	-0.656626	0.5133

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Dilihat dari tabel 10 hasil uji t diatas apat dilihat pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen secara parsial ialah:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai t tabel 1.98969/-1.98969 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung sebesar (0.155455 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.8769. Nilai t hitung < t tabel (0.918770<1.98969) dan signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.3609 > 0.05) maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak akan mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetya (2017) menemukan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil yang sama juga dialami oleh (Purba & Gulo, 2022)

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel Dana Perimbangan diperoleh nilai t tabel 1.98969/-1.98969 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung sebesar (5.651804 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0000. Nilai t hitung > t tabel (5.651804<1.98969) dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.0000 < 0.05) maka hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Artinya semakin besar Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerindah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan maka akan semakin besar pula dana yang di alokasikan untuk belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lestari, 2017) menunjukkan dana perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

3. Pengaruh SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel SiLPA diperoleh nilai t tabel 1.98969/-1.98969 (lihat pada tabel staistik). Karena nilai t hitung sebesar (-0.656626 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.5133. Nilai t hitung < t tabel (-0.656626<1.98969) dan signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.5133 < 0.05) maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya SiLPA di Provinsi Sumatera Selatan tidak akan mempengaruhi alokasi belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tiyas & Wuryani, 2022) menemukan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Uji f

Tabel 11 : Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.497373
Adjusted R-squared	0.478757
S.E. of regression	0.233756
F-statistic	26.71772
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 11 hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 2.72 (lihat pada tabel statistik). Karena F hitung > F tabel ($26.71772 > 2.72$) maka H4 diterima. Jadi dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H4 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H4 ditolak. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$) maka H4 diterima. Artinya PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12 : Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.497373
Adjusted R-squared	0.478757
S.E. of regression	0.233756
F-statistic	26.71772
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 12 hasil Koefisien determinasi dapat diketahui nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.478757 artinya persentase sumbangan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal sebesar 47.8% sedangkan sisanya 52.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan SiLPA terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan SiLPA secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara simultan, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nanda Yoga, dan Novi Dirgantari. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* XV(1):1. doi: 10.30742/equilibrium.v0i0.414.
- Adi Ahdiat, 2022. RAPBN 2023 : Belanja Pegawai Naik, Belanja Modal Turun. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/rapbn-2023-belanja-pegawai-naik-belanja-modal-turun> pada tanggal 23 April 2023.
- Angelina, Chynthia, Janice Janice, Christalia Clarina, Wina Wira Fanjaya, dan Jesisca Jesisca. 2020. "Pengaruh PE, PAD, DAU Dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal." *Owner* 4(1):138. doi: 10.33395/owner.v4i1.182.
- Darise, N. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesa. Jakarta: PT. Indeks.
- Darwanto, dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal." *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Efendi Jikwa, Agustinus Salle, Paulus K. Allo Layuk. 2017. "Pengaruh Pendapatan Transfer Dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Mamberamo Tengah." 2(2):1-15.

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaunang, Cheri Enjelita, Amran T. Naukoko, dan Albert T. Londa. 2016. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2):355–65.
- Kemenkeu. 2011. *Deskripsi Dan Analisis APBD 2011*. 1–61.
- Lestari, Winda Putri, (2017), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, No. 6.
- Lumikis, Riri I, David P. Saerang, dan Ventje Ilat. 2015. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 6(52–63).
- Malau, Eve Ida, Calen, Victor Marudut Mulia Siregar, dan Kharisma Yudha Saragih. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara." *Owner* 4(1):356–61. doi: 10.33395/owner.v4i1.168.
- Pelealu, Andreas M., Pengaruh Dana, Alokasi Khusus, Pengaruh Dana, Alokasi Khusus, D. A. N. Pendapatan, and Asli Daerah. 2012. "2892-5366-1-Sm." 1(4):1189–97.
- Peraturan Menteri Keuangan 214/PMK.05 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Purba, Imelda Rimenda, dan Vivin Tri Indawati Gulo. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016 - 2021." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 8(2):231–45. doi: 10.54367/jrak.v8i2.1671.
- Risqiyah, Waridhatul, dan Ahmad Yunani. 2022. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah." 5(8.5.2017):2003–5.
- Samudra, Azhari Aziz. 2005. *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Scott, Wiliam R. 2015. *Financial Accounting Theory Sevent Edition*. United States : Canada Cataloguing.
- Setiawan, Ade Budi, dan Andris. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Akunida* 5(1):1. doi: 10.30997/jakd.v5i1.1822.
- Siagian, Ade Onny. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Jurnal Bisnis Terapan* 4(2):141–58. doi: 10.24123/jbt.v4i2.2848.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan. 2014. "Analisis Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Fiskal Daerah Dan Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Hidup Masyarakat Jawa Timur." (November):829–41.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Tiyas, Endah Ayuning, dan Eni Wuryani. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 10(3):22–33. doi: 10.26740/akunesa.v10n3.p22-33.